



BULETIN

MEDIA PARLEMEN

TAHUN 2020



M. Sholihin, S.Sos. I
Wakil Ketua DPRD

H. Syaefudin, SH
Ketua DPRD

H. Sirojudin, SP
Wakil Ketua DPRD

T u r a h
Wakil Ketua DPRD

ANGGOTA DAN PENDAMPING DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENJALANI TEST RAPID COVID-19

**Bonus
Berita Bergambar**



Download Buletin Edisi Juni 2020

COVID-19
CORONAVIRUS



**RAPAT KERJA
DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
DENGAN GUGUS TUGAS COVID 19
BERSAMA MELAWAN COVID-19,
BANK BJB DAN DPRD INDRAMAYU
SALURKAN BANTUAN**

Buletin Edisi Juni 2020



Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Novel coronavirus (2019-nCoV) adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS

GEJALA KLINIS

- Demam
- Batuk, Pilek
- Gangguan Pernafasan
- Sakit Tenggorokan
- Letih, Lesu

Pencegahan Coronavirus

- Sering cuci tangan pakai sabun.
- Gunakan masker bila batuk atau pilek.
- Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah.
- Hati-hati kontak dengan hewan.
- Rajin olahraga dan istirahat cukup.
- Jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak.
- Bila batuk, pilek dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan.

BACI YANG MELAKUKAN PERJALANAN KE CINA:

- Hindari memakai jasa transportasi di kota-kota besar.
- Jika mengalami penyakit pernapasan selama di Cina atau setelah kembali ke tanah air, segera hubungi petugas kesehatan dan sampaikan riwayat perjalanan.
- Hindari kontak langsung dengan babi.

SAAT INI BELUM TERSEDIA VAKSIN 2019-nCoV

Berita Bergambar



Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah



Komisi 3 Kunjungi Pasar Jatibarang



Kunjungan Lapangan Komisi II Ke RSUD MA Sentot



Bank BJB Dan DPRD Salurkan Bantuan



Wakil Ketua DPRD Datangi Lokasi Banjir Rob



Wakil Ketua DPRD Datangi Lokasi Banjir Rob



Website : www.dprd-indramayukab.go.id
e-mail : sekretariat@dprd-indramayukab.go.id
Facebook: [mediaparllemen](#), Instagram: [dprdindramayu](#)

Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu
Jl. Jendral Sudirman No. 159 Indramayu 45212
Telp. (0234) 274056, Fax. (0234) 271278, 274056

**HUBUNGI BAGIAN HUMAS & PROTOKOL
UNTUK HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Daftar Isi

01



Seputar Indramayu

Rapat Kerja DPRD Kabupaten Indramayu Dengan Gugus Tugas COVID 19

Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu Datangi Lokasi Banjir Rob

Masyarakat Jatayu Audensi Ke DPRD

Anggota Dan Pendamping DPRD Kabupaten Indramayu Menjalani Test Rapid COVID-19

Bersama Melawan COVID-19, Bank BJB Dan DPRD Kab. Indramayu Salurkan Bantuan

Karang Taruna Amis Usung Piala Ketua DPRD

Kijang Penjuru Indramayu Silaturahmi Dengan Ketua DPRD

02



Kunjungan Kerja

Komisi IV DPRD Indramayu Study Banding Ke Semarang

Komisi I Bahas Tenaga Honorer Dengan Wakil Bupati Bangkalan

Pimpinan DPRD Indramayu Temui "GERTAC"

Komisi II Mensosialisasikan RAPERDA Dan PERDA Tahun 2019 dan 2020

DPRD Indramayu dan DPRD Jepara Sharing Pengembangan Koperasi dan UMKM

Banang DPRD Kab. Indramayu Kunjungan Ke Demak dan Semarang

Komisi IV Gelar Sosialisasi RAPERDA Dan PERDA TA 2020

Kunjungan Kerja Komisi II Ke RSUD M.A Sentot

Tingkatkan Kualitas Bapemperda DPRD Kab. Indramayu Kunjungi Tegal dan Pemalang

Komisi III Kunjungan Kerja Ke Malang dan Surabaya

Sosialisasi PERDA dan RAPERDA Komisi III DPRD Datangi Kecamatan

Komisi IV Sharing Pengelolaan Sampah dan Penanganan Limbah Industri di Surabaya

03



Agenda Konsultasi

Konsultasi Bapemperda Ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri

Komisi IV Konsultasi Ke Bapenas Tentang RKPD

Komisi II Konsultasi Ke Kemenkes Mengenai Pengelolaan BLUD

Inquiry

02



Kunjungan Kerja

Peduli Covid-19 Wakil DPRD Bagikan APD Ke RSUD

Komisi IV DPRD Kab. Indramayu Kunjungan Lapangan Ke Areal Lahan PLTU II

Komisi II DPRD Kab. Indramayu Kunjungan Lapangan Ke Sejumlah PUSKESMAS

Komisi III DPRD Kab. Indramayu Kunjungi Pasar Jatibarang

BAMUS DPRD Kab. Indramayu Kunjungi DPRD Provinsi Jawa Barat

Kunjungan Kerja Komisi I Dalam Penanganan Masalah Buruh Migran

03



Agenda Konsultasi

Komisi III DPRD Indramayu Konsultasi Ke Dirjen Perdagangan

Komisi II Konsultasi Mengenai Dana BOS Ke Kementerian Pendidikan

Komisi III Konsultasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat

RAPAT KERJA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN GUGUS TUGAS COVID 19



Foto Dok. MP

INDRAMAYU MP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu melalui lintas komisi yang dipimpin Ketua DPRD kabupaten Indramayu H Syaefudin gelar rapat kerja (raker) dan dengar pendapat dengan BPBD, TNI, POLRI, Asda 2, Asda 3, gugus tugas Covid 19 yang bertugas melakukan percepatan penanggulangan virus corona atau Covid 19. Rapat kerja inipun diantaranya terkait rencana dan langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi wabah dan memutus mata rantai penyebaran corona virus. rapat kerja berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (30/03/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H Syaefudin, SH., mengatakan, raker ini sangat penting karena merupakan dengar pendapat dengan gugus tugas dan agar pendapat masukan terkait antisipasi percepatan penanggulangan penyebaran virus corona yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. "Ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam pencegahan virus corona di Kabupaten Indramayu, walaupun Kabupaten indramayu belum ditemukan pasien positif terjangkiti virus Covid 19 ini, ujarnya. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dalam rapat kerja ini berharap gugus tugas dapat bekerja dengan baik termasuk aktif melakukan sosialisasi pencegahan virus corona/covid19.

Dalam raker tersebut, ketua komisi IV M Alam Sukmajaya ST.,MM meminta kepada gugus tugas mengambil langkah yang konkrit dalam penanganan covid 19. Seperti halnya di sejumlah RSUD dan puskesmas agar dapat meningkatkan pelayanan yang diantaranya berupa menyediakan fasilitas ruang isolasi. M Alam Sukmajaya juga menyampaikan beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam upaya percepatan penanggulangan Covid – 19 oleh gugus tugas ini, selain itu agar melakukan pemantauan dan pengawasan warga masyarakat dengan harapan gugus tugas ini benar- benar mengetahui ODP serta PDP.

"Kita sebaiknya jangan terfokus pada ODP dan PDP saja, namun juga mewaspadai para pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Indramayu, sebagai upaya cegah tangkal.ujarnya.

M. Alam Sukmajaya juga meminta kepada petugas di lapangan yang berjaga untuk dapat menggunakan peralatan seperti alat pendeteksi suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan agar setiap masyarakat yang memasuki wilayah Kabupaten Indramayu melalui jalur yang rawan bisa ditanggulangi.

Alam, menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten bahwa penyemprotan disinfektan jangan hanya bersifat simbolis saja, lakukanlah secara merata. Kalo bisa ada inovasi yang baru karena penyemprotan disinfektan bertahan hanya 6 jam, Dan kalo bisa kita kasih edukasi terhadap masyarakat tentang pencegahan Covid19 ini.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Abdul Rohman SE.,MM sebelum gugus tugas Kabupaten Indramayu mengeluarkan status tanggap darurat. Sebaiknya gugus tugas Kabupaten Indramayu harus mempertimbangkan dampak sosial dan dampak ekonomi dengan kajian yang matang.

Sementara itu, H Ruswa menanggapi penyampaian anggota gugus tugas Maman Kostaman terkait acuan dasar surat keputusan yang di keluarkan pemerintah kabupaten indramayu yang di tandatangi PLT Bupati tanggal 16 maret 2020 sedangkan Penetapan status itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona

RAPAT KERJA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN GUGUS TUGAS COVID 19 (Hal. lanjutan..)



Foto Dok. MP

Virus Deases 19 (Covid-19) di Jawa Barat yang ditandatangani Ridwan Kamil pada tanggal 19 Maret 2020.

Di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu anggota Komisi IV Amroni S.IP menyampaikan dengan dikeluarkannya status tanggap darurat ini. ketika rakyat kecil yang terkena dampak ekonomi penanganannya itu seperti apa. karena hal yang seperti ini harus lebih diperhatikan.

Dalam rapat kerja dengan kalangan legislatif ini, anggota gugus covid 19 yang juga sebagai ASDA II Pemkab Indramayu Maman Kostaman, menyampaikan langkah – langkah kerja gugus tugas covid 19 di antaranya melakukan himbauan kewaspadaan covid 19, membuat surat edaran bupati, memasang spanduk dan baliho di tempat strategis terkait pencegahan penyebaran virus corona/covid19 juga memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Sirojudin SP, berharap ketua dan jubiir gugus tugas covid 19 Kabupaten Indramayu hadir untuk memaparkan penjelasan terkait perkembangan covid19/corona yang ada di Kabupaten Indramayu. Tim MP.



WAKIL KETUA DPRD KAB. INDRAMAYU DATANGI LOKASI BANJIR ROB



Indramayu (MP) - Daerah pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir yang sangat spesifik, karena di wilayah ini terjadi interaksi antara tiga komponen lingkungan yaitu laut, darat dan udara. Zona pantai senantiasa memiliki proses penyesuaian yang terus menerus menuju keseimbangan alami terhadap dampak dari pengaruh eksternal dan internal baik yang bersifat alami maupun campur tangan manusia/buatan. Faktor alami diantaranya gelombang, arus, kecepatan dan arah angin, debit sungai, kondisi tumbuhan pantai serta aktivitas tektonik maupun vulkanik. Sedangkan kegiatan campur tangan manusia/buatan seperti pemanfaatan kawasan pantai sebagai suatu kawasan perikanan, industri, pelabuhan, pariwisata, pertanian, kehutanan, pertambangan dan pemukiman.

Pantai Eretan Indramayu merupakan bagian dari perairan pantai utara Jawa Barat ialah kawasan strategis dalam pengembangan kawasan pesisir. Daerah tersebut dimanfaatkan sebagai areal pelabuhan perikanan, pertambangan garam dan ikan, pemukiman. Peningkatan pemanfaatan areal pantai menimbulkan gangguan terhadap ekosistem dan keseimbangan dinamika pantai. Masalah yang timbul di daerah pantai yakni abrasi, sedimentasi, pencemaran dan intrusi air laut.

Dampak rusaknya breakwater di pesisir pantai eretan wetan kecamatan kandanghaur kabupaten indramayu mengakibatkan tergenangnya hampir dua ribu rumah penduduk terkait hal ini wakil ketua DPRD kabupaten indramayu M. Sholihin, S.Sos.I melakukan kunjungan lapangan melihat secara langsung situasi yang terkena dampak jebolnya breakwater, kunjungan lapangan ini perlu dilakukan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten indramayu, dalam fungsi legislatif dalam memperjuangkan masyarakat. Rabu (3 juni 2020)

Setelah melihat secara langsung lokasi breakwater yang rusak kami DPRD Kabupaten indramayu bersama pemerintah daerah kabupaten indramayu serta mengajak pemerintah provinsi dan pusat bersama sama mengatasi Abrasi di Pantai Eretan Indramayu karena hampir mencapai perumahan warga, dalam hal ini harus ada inisiatif dan trobosan yang baru program kedepan untuk mengatasi abrasi, “Dalam waktu dekat DPRD Kabupaten indramayu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya untuk memperbaiki breakwater yang rusak, kami juga bersama pemerintah daerah akan membentuk tim kajian, apakah breakwater tersebut perlu direlokasi ataukah bagaimana, yang jelaskan melakukan misi kemanusiaan dalam rangka penyelamatan masyarakat setempat dan lingkungan sehingga diharapkan masyarakat desa eretan wetan bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya dengan tenang tanpa ada rasa khawatir akan datangnya banjir rob”. Tegas M. Sholihin, S.Sos.I

Dalam kunjungan lapangan wakil ketua M. Sholihin, S.Sos.I di dampingi Kepala Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Eddy, berharap kepada yang terhormat wakil rakyat agar memperjuangkan aspirasi ini dan juga menyampaikan kepada dinas terkait agar segera memperbaiki waterbreak yang rusak supaya aktifitas masyarakat desa eretan wetan bisa berjalan dengan seperti biasanya. tandasnya penuh harap. TIM MP.



Foto Dok. MP

MASYARAKAT JATAYU AUDENSI KE DPRD

INDRAMAYU MP - Dengan membawa sejumlah poster dan sepanduk, warga desa Mekarsari (JATAYU) desak DPRD hentikan energi kotor yang merampas ruang hidup.

Masyarakat desa Mekarsari yang diwakili oleh jaringan tanpa asap batu bara indramayu (Jatayu) menyampaikan aspirasi di gedung DPRD kabupaten Indramayu. tepat hari ini warga desa Mekarsari berusaha mempertahankan ruang hidup mereka yang menjadi lahan mata pencaharian selama berpuluh-puluh tahun lamanya. (Senin 20 Januari 2020).

Masyarakat desa Mekarsari (JATAYU) mendesak kepada DPRD Kabupaten Indramayu dan dinas terkait agar segera merealisasikan tuntutan mereka agar “pembangunan PLTU II di hentikan.

Dalam aksi unjuk rasa ini di lakukan audensi untuk menyampaikan aspirasi yang di temui langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH didampingi wakil ketua M. Solihin, S.Sos. I dan Sirojudin, SP.

Menurut Domo salah satu warga Mekarsari menyampaikan aspirasi "**mendesak agar DPRD hentikan energi kotor yang merampas ruang hidup. Dan kami berharap semoga anggota DPRD kabupaten Indramayu menyikapi aspirasi ini dengan tegas dan bersungguh-**

sungguh memperjuangkan nya" tegasnya.

Anggota DPRD harus punya sikap tegas bagi kepentingan masyarakat dengan adanya pembangunan PLTU II di desa Mekarsari. Seharusnya pemerintah harus mempertimbangkan serta melihat bagaimana dampak PLTU II yang akan mengancam lingkungan serta mengancam mata pencaharian warga selama ini. apalagi PLTU II tersebut memakai bahan bakar batu bara yang akan berdampak terhadap kesehatan dan kerusakan kualitas lingkungan. "Ungkap Wahyudin perwakilan WALHI Jabar.

Menurut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indramayu M Solihin kami akan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat desa Mekarsari. dalam waktu dekat ini kami akan melakukan kunjungan lapangan melihat langsung situasi dan kondisi yang sudah terjadi, dan kami pun selaku unsur pimpinan memerintahkan komisi terkait, untuk melakukan rapat kerja dengan stekholder. Tegasnya.

Dalam hal ini pun Sirojudin sp. Wakil ketua II menyikapi aspirasi masyarakat desa Mekarsari (JATAYU) DPRD bukanlah lembaga pemutus. dengan tugas dan fungsi kami selaku anggota DPRD kabupaten Indramayu yaitu sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan. Menanggapi aspirasi tersebut dalam waktu dekat ini DPRD akan mengadakan rapat gabungan dengan semua komisi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing."tegasnya.

Aksi unjuk rasa jaringan tanpa asap batu bara indramayu (Jatayu) desa Mekarsari setelah di temui langsung unsur pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu masa membubarkan diri dengan tertib dan damai.(Tim Mp)



Foto Dok. MP





ANGGOTA DAN PENDAMPING DPRD KABUPATEN INDRAMAYU MENJALANI TEST RAPID COVID-19

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan para pegawai ASN di lingkungan sekretariat dewan (Setwan) Kabupaten Indramayu menjalani rapid test Covid-19 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Pemkab Indramayu, diruang Muspida Gedung DPRD Kab. Indramayu rabu (3/6/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH, mengatakan dengan bertepatan PSBB yg masih diberlakukan di Kab.Indramayu ini dan dalam rangka menindak lanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pandemi Covid-19 untuk memastikan para wakil rakyat tersebut tidak terpapar virus Covid-19. Pasalnya selama pandemi ini mobilitas kerja mereka berhadapan langsung dengan masyarakat tergolong tinggi kinerja.

“Dalam melakukan tugasnya Anggota Dewan menggunakan protokol kesehatan dengan membatasi berkerumunnya warga, terutama menggunakan masker Harapan kita semuanya sehat dan Anggota DPRD bisa menjalankan tugas seperti sedia kala dengan baik di wilayah Kabupaten Indramayu ini,” jelasnya.

Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, M Alam Sukmajaya, ST.MM mengungkapkan, rapid test untuk Anggota DPRD dilakukan karena mereka merupakan kelompok yang beresiko, terlebih seringkali para wakil rakyat ini melakukan perjalanan dalam rangka kunjungan lapangan di wilayah Kabupaten Indramayu.



COVID-19
CORONAVIRUS

Tak hanya anggota DPRD, staf pendamping dari kalangan ASN pun juga mengikuti rapid test. Namun karena keterbatasan alat dan personil dari Dinas Kesehatan tidak semua staff ASN mengikutinya Sekretaris DPRD (sekwan) Iding Syafrudin, SE.M.Si mengatakan, staff yg mengikuti rapid mereka yg sedianya bertugas sebagai staf pendamping, dan ikut terjun langsung ke masyarakat. (Tim.MP).



Dalam situasi krisis seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu membutuhkan banyak dukungan bagi seluruh lapisan masyarakat guna membasmi Covid-19 di wilayah Kabupaten Indramayu. Sebagai bank yang tumbuh berkembang di tanah Jawa Barat, bank bjb senantiasa mendukung segala upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan kesejahteraan, keselamatan dan keamanan warganya.

Bertempat di ruang lobi Gedung DPRD Kabupaten Indramayu (selasa,19/05/20) M. Aditya W, Pimpinan Cabang Bank bjb menyerahkan bantuan sebanyak kurang lebih 1060 dus sembako yang diterima langsung Wakil Ketua DPRD, M. Sholihin, S.Sos.I dan Sirojudin, SP.

“Bantuan ini adalah sebagai bukti nyata bahwa bank bjb dan Pemerintah Daerah saling bekerja sama dalam rangka penanggulangan Virus Covid-19. kami semua berharap wabah ini segera berakhir dan kehidupan masyarakat kembali seperti sedia kala.” Tutur Aditya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu, M. Sholihin , S.Sos.I dan Sirojudin, SP mengucapkan terima kasih kepada Bank bjb yang sudah berpartisipasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Pihaknya akan segera menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Indramayu yang terdampak virus corona (COVID-19). (Tim.MP).



**BERSAMA MELAWAN COVID-19,
BANK BJB DAN DPRD KAB. INDRAMAYU
SALURKAN BANTUAN**



KARANG TARUNA AMIS USUNG PIALA KETUA DPRD

INDRAMAYU MP – Karang Taruna Amis Indramayu kunjungi Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH. Maksud dan tujuan kedatangannya untuk bersilaturahmi dan melaporkan mengenai kesiapan penyelenggaraan Grass Track Motor Cross tingkat Nasional di Desa Amis, yang rencananya akan digelar akhir bulan ini dengan memperebutkan Piala Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya menurut juru bicara Karang Taruna Amis Indramayu mengatakan “sangat berterimakasih atas di terimanya kami untuk ber silaturahmi langsung di gedung rakyat dengan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan melaporkan mengenai kegiatan kami dan mendukung sepenuhnya “katanya.



“Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Mendukung Sepenuhnya “

Bertempat di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin SH yang memberikan sambutan hangat dan respon yang antusias "saya sangat senang dengan kedatangan teman-teman dari Karang Taruna Amis Indramayu yang akan menyelenggarakan Motor Cross Grass Track memperebutkan Piala Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, saya mengapresiasi kegiatan positif ini dimana kegiatan olah raga ini merupakan khas Indonesia dan merupakan kegiatan tingkat nasional pertama di Indramayu, saya juga berharap kegiatan ini dapat mengangkat nama Indramayu di ajang Nasional dan berdampak positif kepada generasi muda di Indramayu.” Katanya.

Dalam pertemuan dengan Karang Taruna Amis di ruang rapat Pimpinan DPRD tersebut, selain sambutan hangat, beliau juga memberikan beberapa wejangan dan harapannya. TIM MP.





KIJANG PENJURU INDRAMAYU SILATURAHMI DENGAN KETUA DPRD

INDRAMAYU MP - Paguyuban Kijang Penjuru Indramayu kunjungi Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Maksud dan tujuan kedatangannya kali ini ingin mempererat silaturahmi dan hubungan antar organisasi masyarakat dengan DPRD Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya menurut Ketua Kijang Penjuru Indramayu Heri Razata mengatakan “ sangat berterimakasih atas di terimanya kami Kijang Penjuru Indramayu untuk ber silaturahmi langsung di gedung rakyat dengan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu “ katanya.

Bertempat di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu kedatangan pengurus Kijang Penjuru Indramayu disambut baik Ketua DPRD kab Indramayu Syaefudin SH yang memberikan sambutan hangat dan respon yang antusias " saya sangat senang dengan kedatangan teman-teman dari pengurus Kijang Penjuru Indramayu yang mewakili beberapa unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Indramayu, karena ini bentuk komunikasi yang efektif dalam menjalin sinergi antara kami DPRD dengan

mereka organisasi masyarakat. Selain itu, saya juga berharap kedepan komunikasi seperti ini akan terus berlanjut supaya hubungan bertambah erat.” katanya, dalam pembicaraan bersama pengurus di ruang rapat DPRD, selain sambutan hangat, beliau juga memberikan beberapa saran dan harapannya terhadap para pengurus “ Kijang Penjuru Indramayu semoga bisa memberikan dampak positif di tengah masyarakat” tegasnya. TIM MP.





Foto Dok. MP

KOMISI IV DPRD INDRAMAYU STUDY BANDING KE SEMARANG

JAWA TENGAH-MP- Komisi IV Bidang Infrastruktur (Pembangunan) DPRD Kabupaten Indramayu melakukan study banding ke Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan Bappeda Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, kunjungan kerja diikuti Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, SP beserta Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya, ST.MM, Wakil Ketua Komisi IV, Abdul Rojak dan Sekretaris Komisi IV, Iffan Sudiawan. Turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Sirojudin, SP mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangan Komisi IV DPRD Indramayu ke Pemkab Semarang dan Kota Semarang dalam rangka berilaturahmi serta mencari informasi dan referensi mengenai RKPD

pikiran anggota DPRD serta ingin membahas seputar infrastruktur (pembangunan) di wilayah kabupaten dan kota semarang.

“pada dasarnya pokok-pokok pikiran (pokir) atau aspirasi tertuang dalam undang-undang dimana setiap 4 (empat) bulan sekali DPRD Kabupaten dan Kota menggelar kegiatan reses turun kelapangan untuk menyerap aspirasi yang nantinya akan dihimpun melalui pokok pikiran (pokir) dan disampaikan pada rapat paripurna oleh masing masing fraksi. Sesuai permendagri no 70 Tahun 2019 terkait pokok pikiran harus dimasukan ke RKPD onlen dan sudah harus mulai berjalan di tahun 2021” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM menyampaikan Komisi IV

DPRD Indramayu ingin mendapat referensi pengalaman mengenai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Online yang bisa diambil untuk pemerintah daerah indramayu

“Rencana musrenbang Kabupaten Indramayu ditahun 2021 akan dilaksanakan di pertengahan bulan maret sesuai dengan aturan yang berlaku seminggu sebelum di gelar musrenbang harus ada sinkronisasi antara DPRD yang membawa aspirasi melalui pokok pikiran dan eksekutif” ujarnya.

Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang, Sunaryo, SH,MH mengatakan Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting, saat ini menjadi komponen penting dalam menentukan sistem perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparansi. Pemerintah Kabupaten Semarang 2 tahun yang lalu sudah mencoba mengintegrasikan E-Budgeting dan E-Planing, Mengenai PP Nomor 70 Tahun 2019 pada intinya sistem informasi (aplikasi) tersebut akan mengakomodir tiga hal diantaranya E-Database, E-Budgeting dan informasi pemerintah daerah.



Foto Dok. MP

KOMISI IV DPRD INDRAMAYU STUDY BANDING KE SEMARANG (Hal. Lanjutan...)

Dilokasi berbeda kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Indramayu disambut Sekretaris Bappeda Kota Semarang, Budi Prakosa, ST.MM didampingi Kasubid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sugeng Hartanto, S.Sos.MT di ruang Kepala Bappeda Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Menanggapi hal tersebut Kasubid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sugeng Hartanto, S.Sos.MT, menjelaskan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang saat ini menerapkan sistem RKPD online. Menurutnya, dari program tersebut setiap anggota DPRD memang bisa menginput langsung program dan kegiatan apa yang diusulkan untuk masuk dalam RKPD. Sumbernya bisa berdasarkan aspirasi langsung masyarakat, temuan di konstituen, maupun dari hasil pokok pemikiran masyarakat yang disampaikan pada waktu kegiatan reses. Prosesnya juga bisa dipantau secara berkala melalui akun username dan password yang dimiliki masing-masing anggota.

“Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kota Semarang sudah bisa dilaporkan secara online. Hal itu memudahkan pihak kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang untuk melaporkan rencana pembangunan, khususnya saat menginput aspirasi masyarakat pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2019. Kota Semarang sebelumnya sudah memiliki sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, evaluasi maupun pelaporan dan pertanggungjawaban, mengenai skema sistem perencanaan ruang lingkup nya mulai dari RPJMD, RENSTRA dan RENJA” Jelasnya.

Lebih lanjut Kasubid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sugeng Hartanto, S.Sos.MT, memaparkan mengenai penerapan sistem perencanaan dilakukan secara parsial.

Inputting usulan kegiatan sarana dan prasarana fisik sudah secara parsial agar meminimalisir kegiatan di lokasi yang sama dan meminimalisir terjadinya double anggaran. (Tim.MP)



Foto Dok. MP

Seperti yang disampaikan oleh Muhni Fahmi, bahwa tenaga honorer di Kabupaten Bangkalan tercatat di BKPSDA (Badan Kepegawaian Pegawai Dan Sumber Daya Aparatur) Kabupaten Bangkalan tahun 2020 sebanyak 3848 yang terdiri dari 881 pada instansi dinas pendidikan, 500 di dinas perdagangan dan sisanya tersebar di beberapa instansi lainnya. Membahas isu permasalahan akan diadakannya penghapusan tenaga honorer atas usulan dari pemerintah pusat, menurut Sekretaris BKPSDA Kabupaten Bangkalan Ari Murfiyanto, sebenarnya aturan tersebut sudah tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014, dimana pegawai pemerintah hanya ada PNS dan PPPK.

KOMISI I BAHAS TENAGA HONORER DENGAN WAKIL BUPATI BANGKALAN

BANGKALAN MP – Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan pembahasan yang berkaitan dengan kepegawaian dan pemerintahan. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Turah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan didampingi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Liyana Listia Dewi, SE dan Wakil Ketua Komisi I H. Imam Mul Mutaqim, serta turut hadir 11 anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Drs. Muhni, MM selaku Wakil Bupati Bangkalan menerima secara langsung kunjungan kerja tersebut dengan didampingi oleh Drs. Moh. Fahri, M.Si selaku ASDA II Kabupaten Bangkalan di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan. Pada kunjungan kerja tersebut Komisi I menilai Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki kultur daerah yang mirip sehingga kedatangan Komisi I DPRD Kab. Indramayu ingin bertukar pikiran terutama membahas mengenai Tenaga Kerja Honorer.

Pemda bangkalan saat ini melakukan upaya yaitu memberi arahan pada tenaga honorer Kabupaten Bangkalan yaitu untuk tetap bekerja seperti biasa selama belum ada SK yang pasti dari pusat Dan bagian dari antisipasi yang dilakukan bpsda pemkab Bangkalan untuk peningkatan kinerja ASN apabila honorer dihapuskan yaitu dengan memanfaatkan sistem IT yang terdiri dari absen dan penilaian kinerja berbasis sistem dengan berdasar pada kehadiran, produktivitas dan perilaku kerja.

Pembahasan yang berjalan selama 2 jam tersebut ditutup oleh serah terima cinderamata dari masing-masing daerah antara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bangkalan yang diwakili oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Turah dan Wakil Bupati Bangkalan, Muhni Fahmi. (TIM MP)



PEDULI COVID-19 WAKIL KETUA DPRD BAGIKAN APD KE RSUD

Masih tingginya wabah pandemi Covid-19 yang masih belum juga berakhir, melihat kondisi ini di butuhkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak khususnya bagi tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 ini, untuk itu di berikan bantuan alat pelindung diri (APD) berupa baju azmat ke beberapa rumah sakit di Indramayu salah satunya RSUD Indramayu , dimana bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu H Sirojudin SP sekaligus juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu yang diterima langsung oleh Dirut RSUD Indramayu, dr Hj Lisfayeni.

H. Sirojudin, SP menjelaskan, pemberian bantuan berupa APD ini dalam rangka membantu petugas medis terkait penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya di Kabupaten Indramayu.

“Kenapa kami berikan ke RSUD? Karena RSUD yang menjadi rujukan pasien dalam pengawasan. Artinya, petugas medis langsung bersentuhan dengan pasien maupun orang,” jelasnya.

Walaupun jumlahnya baru 100 buah, H. Sirojudin, SP berharap, dapat membantu para medis dalam bekerja menangani Covid-19.

Sirojudin menambahkan, akan terus membantu pemerintah dalam hal penanganan Covid-19. Baik melalui imbauan, edukasi ke masyarakat maupun berupa pemberian APD, hand sanitizer, masker dan disinfektan.

“Ini menjadi prioritas utama kami. Semoga penyebaran Covid-19, khususnya di Kabupaten Indramayu dan umumnya di Indonesia, segera bisa diatasi,” tuturnya

Sementara bantuan APD untuk RSUD Krangkeng sebanyak 50 buah , RSUD Bhayangkara 100 buah dan RSUD MA Sentot sebanyak 50 buah. (TIM MP)

“Ini menjadi prioritas utama kami. Semoga penyebaran Covid-19, khususnya di Kabupaten Indramayu dan umumnya di Indonesia, segera bisa diatasi”



INDRAMAYU-MP.Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan di area lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II di blok pintu plawad desa Mekarsari, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Kunjungan lapangan dipimpin Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya ST.MM didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Indramayu, Aep Surahman beserta jajaran dan Anggota Komisi IV DPRD Indramayu, Bhisma Panji D, S.Si Apt, Estim enting dan Karmadi disambut baik puluhan warga terdampak PLTU yang tergabung dalam komunitas Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu), di areal lahan PLTU II Indramayu.

Dengan adanya kedatangan Komisi IV DPRD Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup ke desa mekarsari langsung dimanfaatkan warga desa mekarsari untung berdialog seputar persoalan yang ada.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya ST.MM mengatakan Komisi IV ingin meninjau langsung lokasi PLTU dan mendengarkan keluhan-keluhan warga desa mekarsari yang berada disekitar PLTU.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya ST.MM mengatakan Komisi IV ingin meninjau langsung lokasi PLTU dan mendengarkan keluhan-keluhan warga desa mekarsari yang berada disekitar PLTU.

“kami ingin melihat langsung ke lokasi dan ingin mengetahui keluhan warga serta dampak dampak PLTU terhadap masyarakat. Keluhan yang disampaikan masyarakat diantaranya disampaikan oleh para nelayan, dampak kesehatan dan dampak terhadap buruh tani warga desa mekarsari, pokok permasalahannya mengenai dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU” Jelasnya.

KOMISI IV MELAKUKAN KUNJUNGAN LAPANGAN KE AREAL LAHAN PLTU II



Foto Dok. MP

Lebih lanjut Ketua Komisi IV DPRD Indramayu M. Alam Sukmajaya ST.MM, menjelaskan mengenai rencana pembangunan PLTU II Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mengeksekusi karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat termasuk masalah perijinan.

“Komisi IV DPRD Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengkonsultasikan kembali kepada pihak propinsi dan pihak terkait” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Indramayu, Aep Surahman, menjelaskan sebelumnya Pemda memiliki kewenangan atas pantai akan tetapi berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 mulai dari titik 0 hingga radius 12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi sehingga mengenai perijinan kewenangan berada di pemerintah propinsi. Tim.MP



DPRD Jepara dan DPRD Indramayu Sharing Pengembangan Koperasi Dan UKM

Gedung DPRD Indramayu mendapat kunjungan dari DPRD Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Kedatangan rombongan yang tergabung dalam Komisi B dan C tersebut dipimpin Ketua DPRD Kab. Jepara, Imam diterima langsung oleh Ketua Komisi III, Ibnu Rismansyah didampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam, SH.KN diruang kerja Komisi III DPRD Indramayu.

Ketua Komisi III dan II DPRD Kabupaten Indramayu sangat menyambut baik kedatangan tamu dari provinsi jawa tengah. “kami pihak DPRD Indramayu mengucapkan selamat datang dan terimakasih DPRD Kabupaten Jepara sudah mampir dan berkunjung ke Kota mangga ini, semoga dengan pertemuan antara indramayu dan jepara bisa mendapat banyak manfaat dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah kita semua” ujar Ibnu Rismansyah.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Imam menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Komisi B dan C dalam rangka silaturahmi dan sharing mengenai pengembangan koperasi dan UKM dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam pengendalian penduduk dan dukungan yang diberikan Poktan Poktan yang ada agar dapat berjalan aktif dan berkembang.

"Kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan pengetahuan setiap anggota komisi untuk bisa melaksanakan tugas dengan maksimal”, Jelas imam.

Menanggapi hal tersebut Dinas Koperasi Pemda Kabupaten Indramayu menjelaskan, jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Indramayu kurang lebih sekitar 532

koperasi, koperasi yang aktif sebanyak 429 dan yang tidak aktif 103 koperasi dan dari 532 koperasi di Indramayu yang sudah mendapatkan nomor induk koperasi dari Kementrian sebanyak 154 koperasi.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melakukan Pembinaan diantaranya upaya meningkatkan sumber daya manusia, ditahun 2020 Dinas Koperasi memberikan anggaran diklat untuk 40 koperasi atau pengurus koperasi”, jelasnya. Lebih lanjut Dinas Koperasi Pemkab Indramayu dalam rangka pembinaan koperasi Pihak Dinas Koperasi Indramayu melakukan satgas pengawasan diantaranya pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dan koperasi primer lainnya serta melakukan upaya meningkatkan kualitas koperasi Dinas Koperasi Pemda Kabupaten Indramayu melakukan penilaian kesehatan koperasi dalam setiap tahunnya. (Tim.MP)



BANANG DPRD INDRAMAYU KUNJUNGAN KE DEMAK DAN SEMARANG

Jawa Tengah MP. Kunker Banang DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Demak dan diterima oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Demak Muh. Muchlis, SE, M.Si dan juga melakukan kunjungan kerja di DPRD Kota Semarang Jawa Tengah rombongan dipimpin ketua DPRD H. Syaefudin, SH di Demak, dan H. Sirojudin, SP, di Semarang. Yang menyampaikan maksud tujuannya berkaitan dengan dengan strategi perumusan / penyusunan KUA, PPAS maupun APBD yang lebih inovatif antara lain penggalian potensi PAD dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

Untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2020 sebesar Rp 403 miliar, Pemerintah Kabupaten Demak menerima bantuan berupa 50 alat Monitoring Transaksi Usaha (Tapping Box) dari Bank Jateng cabang Kabupaten Demak. Tapping Box tersebut akan dipasang pada mesin kasir para pelaku usaha di Kabupaten Demak. Misalnya, Hotel, Restoran, Rumah Makan, dan tempat usaha lainnya. Pemasangan Tapping Box tersebut merupakan satu wujud keterbukaan Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengelola pajak pendapatan Daerah. Seperti yang dijelaskan oleh OPD BPKPAD kabupaten, Kepala Bidang Pendapatan Agustin Eka Safitri, S.kom.

sedangkan di Semarang diungkapkan oleh Bapeko Semarang saudara Jokopur. Upaya untuk meningkatkan pendapatan itu bisa disiasati dengan cara menggali Potensi Daerah. Kemudian menggenjot BUMD dan Sinergitas SKPD pengemban tugas Restribusi dan Pajak Daerah yang harus terus ditingkatkan. Kendati demikian, ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD. Salah satunya dengan mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru. Ada sumber daya lain yang bisa dijadikan pemasukan yaitu untuk BUMD harus menghasilkan keuntungan deviden nya itu 14 persen dengan cara memanfaatkan lahan yang masih menganggur.
(tim mp)



Foto Dok. MP



KOMISI IV DPRD INDRAMAYU GELAR SOSIALISASI RAPERDA DAN PERDA TA 2020

INDRAMAYU(MP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Peraturan Daerah (PERDA) Tahun Anggaran 2020 di wilayah Kabupaten Indramayu diantaranya Kecamatan Sukra, Kecamatan Losarang dan Kecamatan Balongan.

Dalam sosialisasi yang digelar di tiga kecamatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kab. Indramayu M. Alam Sukmajaya, ST.MM, setidaknya ada realisasi Peraturan Daerah tahun 2019 yang disosialisasikan di wilayah kecamatan Sukra, Loasarang dan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu. 16 Peraturan Daerah (Perda) tersebut meliputi Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Ikan dan Petani Tambak, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018, Perubahan APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019, APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2020, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Gantar, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Haurgeulis, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bangodua, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Anjatan, Raperda tentang Penyelenggaraan Layak Anak, Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu, Raperda Tentang Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, Raperda Tentang Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.



Pada kesempatan sosialisasi tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kab. Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM mengatakan, sosialisasi bertujuan untuk menghimpun masukan dari publik sebelum raperda tersebut diparipurnakan dan dijadikan Perda.

“Komisi IV DPRD Indramayu memandang sosialisasi ini sangat penting, melalui sosialisasi ini kami dapat mendapatkan masukan dari publik, sebelum nantinya kami paripurnakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat akan menjadi lebih tahu terhadap Fungsi Perda sebagai payung hukum di masyarakat serta masyarakat dapat memahami lebih tentang regulasi yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Indramayu, DPRD Indramayu menitik beratkan untuk meminta masukan dari publik dalam rangka untuk menyempurnakan Raperda yang nanti akan dibahas pada forum Pansus yang kemudian akan dijadikan Poduk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu”

KUNJUNGAN KERJA KOMISI II KE RSUD MA SENTOT



INDRAMAYU MP- Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Kerja Ke RSUD MA Sentot berkaitan dengan banyaknya keluhan dari keluarga pasien dan pemberitaan di media, buruknya pelayanan dari Rumah Sakit Pantura MA. Sentot Indramayu, khususnya dengan antrian pendaftaran yang panjang sehingga calon pasien harus antri sejak dari subuh, bahkan mewakili dirinya dengan sandal, batu, helm dll.

Kunjungan Kerja yang di Pimpin langsung Ketua Komisi II Dalam SH. KN dan di dampingi anggota Komisi II diantaranya Drs H Haryono, Dullah, Hj Siti Aminah ini merupakan yang sekian kalinya ke Rumah Sakit Pantura MA. Sentot. Sebagai mitra Kerja, kedatangann Komisi II ke Rumah Sakit Pantura MA. Sentot diterima oleh management Direktur Rumah sakit dr Kurniawan serta jajarannya dan sekaligus meminta keterangan dari pihak management Rumah Sakit, terkait permasalahan pelayanan yang masih menjadi persoalan bagi keluarga pasien yang berobat di Rumah sakit tersebut.

Dimana sebelumnya beberapa anggota Komisi II mengitari lokasi RSUD MA Sentot menanyakan secara langsung ke Pasien yang ada di situ. Bahkan Ketua Komisi II selama beberapa hari mencari informasi secara langsung dan ikut antri pendaftaran untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya dan menyampaikan temuannya secara langsung kepada Management saat Kunjungan Kerja tersebut, dimana hal tersebut dilakukan untuk kemajuan RSUD MA Sentot dengan harapan menjadi rumah sakit yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Indramayu,serta khususnya kegiatan ini sebagai fungsi pengawasan dari pihak legislatif.

Menanggapi hal tersebut Dirut RSUD Sentot dr Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, yang sekaligus memberikan masukan positif bagi management RSUD MA Sentot dan dalam waktu dekat management akan Launching system Pendaftaran online untuk meminimalisir antrian dan meningkatkan pelayanan RSUD MA Sentot Indramayu. TIM MP.



TINGKATKAN KUALITAS BAPEMPERDA DPRD KAB INDRAMAYU KUNJUNGI TEGAL DAN PEMALANG



TEGAL (MP) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.

Sebagai salah satu program kerja dan kegiatan DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Serta sesuai jadwal yang telah di tetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu. Kunjungan kerja di pimpin langsung unsur pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu H Syaefudin, SH, H Sirojudin SP, Turah, dan di dampingi Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu Drs. H Eddy Mulyadi, SE.MM, Wakil Ketua Bapemperda H Abdul Rohman, SE.,MM dan anggota Tuti Alawiah, SH, Drs. H Muhaemin, H Haryono, Msi, Abdul rojak, M Alam sukma jaya, ST.,MM, Akhmad mujani nur, SH.I, Dalam, SH.KN, Anggi Novia, S.I.POL, Dullah, H Nico Antonio, Bhisma Pandji Dewantara, S.SI.APT.

Kunjungan kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu ke Kabupaten Tegal di terima langsung Kasubag Persidangan dan Perundan-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, Dewi dalam sambutannya dirinya sangat berterima kasih karena DPRD Kabupaten Tegal dijadikan pilihan untuk kunjungan kerja kali ini. Bertempat di ruang Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, H Sirojudin SP menuturkan kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka sharing serta menggali informasi dan mencari referensi tambahan tentang tata cara penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah, dan penampung aspirasi masyarakat tentang rencana anggaran pembangunan di daerah.

Menanggapi hal tersebut Dewi, menjelaskan terkait dengan pokok pokok pikiran tentang aspirasi masyarakat dituangkan dalam PERDA nomor 4 tahun 2016. Serta diperlukan pula sinergitas antara Pemerintah Daerah, DPRD, dalam rangka menunjang pembangunan di daerahnya karena pikir itu dilakukan pada saat Musrembang Pemerintah daerah,

Kecamatan, dan Desa atas penjarangan aspirasi masyarakat terhadap usulan usulan yang ditampung oleh kecamatan usulan apa yang menjadi skala prioritas dibidang pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam PERDA no 4 tahun 2016 Kabupaten Tegal pada pasal 12 tentang penentuan besaran pagi indikatif SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dengan pertimbangan tegasnya. Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Pemalang, rombongan diterima langsung Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang M. Syafii, S., Ag terkait tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pemalang terhadap raperda yang diajukan baik dari eksekutif maupun dari DPRD Raperda tersebut harus di disposisi oleh ketua dan dikaji dibahas oleh bapemperda sehingga apakah raperda yang akan diajukan layak atau tidaknya. Lalu dituangkan dalam propemperda dilampiri penjelasan sebelum raperda tersebut dilanjutkan dan maksimalisasi,” jelasnya pada tingkatan pembahasan pansus. Dalam pembahasan sesuai PP 12 Tahun 2018 bahwa setiap pembahasan dalam pansus jumlah minimal 12 dan maksimal 15 orang. Di akhir Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Indramayu ke Kabupaten Tegal dan Pemalang saling bertukar cinderamata tanda kunjungan kerja sudah selesai. TIM MP

KOMISI III KUNJUNGAN KERJA KE MALANG DAN SURABAYA

JAWA TIMUR MP - Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu ke Pemerintahan Kota Surabaya diterima di ruang rapat Giri arta. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua M. Sholihin dan didampingi Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah disambut baik oleh perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Suabaya.

Pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD M Sholihin, S.Sos.I mengungkapkan maksud kunjungan kerja ini terkait dengan Restribusi dan Pajak Daerah, untuk bisa menggali pengetahuan tentang bagaimana mekanisme yang ditempuh sehingga dari unsur restribusi dan pajak daerah ndapat berjalan dengan semestinya dan mampu dijadikan sebagai unsur dalam peningkatan PAD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan pajak daerah, BPKPD Kota Surabaya mengintergrasikan dengan sistem informasi terpadu yang berbasis teknologi informasi, dengan sistem yang telah terintegrasi tersebut, pencatatan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dapat secara realtime terekam dalam database sehingga kemungkinan untuk manipulasi data sangat minim.

Seperti halnya di Kota Malang, yang sudah menerapkan sanksi khusus bagi mereka wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak. Sanksi itu berupa penempelan stiker himbauan bahwa wajib pajak ini belum membayar pajak. Jika mereka wajib pajak masih belum bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka pihak kejaksaan akan mengambil alih wewenangan untuk menindak lanjuti. (Tim MP)



Foto Dok. MP



SOSIALISASI PERDA DAN RAPERDA KOMISI III DPRD DATANGI KECAMATAN

INDRAMAYU(MP) - Komisi III DPRD kabupaten Indramayu mensosialisasikan RAPERDA dan PERDA diantaranya di kecamatan Kandanghaur, Krangkeng dan kecamatan Jatibarang.

Dengan adanya sosialisasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar mengetahui RAPERDA dan PERDA apa saja yang sudah di buat, Dan diperjuangkan legislatif beserta eksekutif di gedung DPRD kabupaten indramayu , sehingga masyarakat bisa memahami lebih dalam tentang regulasi yang telah dihasilkan oleh DPRD, Karena sosialisasi tatap muka secara langsung pada masyarakat merupakan media efektif dalam memberikan informasi.

“ Sosialisasi yang langsung menyentuh pada masyarakat, dapat lebih meningkatkan dan menjalin hubungan yang baik, antara masyarakat dan anggota DPRD kabupaten idramayu, termasuk juga dapat memberikan pokok pokok pikiran anggota DPRD pada masyarakat “ seperti yang dikatakan Ketua komisi III Ibnu Rismansyah.

Dalam rangka sosialisasi RAPERDA dan PERDA Kabupaten Indramayu, Dalam sosialisasi inipun hadir dan turut mengendampingi sekretaris ahmad fathoni dan anggota komisi III Fenty Ruchyanti, Hj. Rini Yuliani, H. Casmuni, Roikhotuljanah, H. Abdul Rohman, Kiki Zakiyah.

"Ada 16 Perda yang sudah ditetapkan dan 11 Raperda di bahas badan pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Indramayu tahun 2020 di antaranya :

1. Raperda tentang tata cara peyusunan program pembentukan peraturan daerah
 2. Raperda tentang perlindungan tenaga kerja migran
 3. Raperda tentang pengembangan industri kembang api
 4. Raperda tentang pengelolaan keolahragaan
- Dan Perda yang sudah di tetapkan

1. Tentang penyertaan modal daerah
2. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petani tambak
3. Perubahan APBD kabupaten indramayu tahun anggaran2019
4. APBD kabupaten indramayu tahun anggaran 2020

Seperti yang diungkapkan ketua komisi III Ibnu Rismansyah Di hadapan Kuwu, BPD, Tokoh Masyarakat, organisasi kepemudaan dan peserta lainnya.

Peserta sosialisasi mengaku sangat mengapresiasi atas adanya kegiatan sosialisasi RAPERDA dan PERDA ini karna anggota DPRD kab Indramayu datang langsung untuk mensosialisasikannya.

pada kesempatan inipun masyarakat dan anggota

DPRD saling sharing dan Banyak masukan dari masyarakat sehingga dapat catatan yang positif ketika pembahasan raperda nanti .

Pada sosialisasi ini pula dimanfaatkan masyarakat terkait adanya permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan jatibarang , diantaranya menurut caswanto pemerintah sudah membangun pasar daerah yang baru dan bagus, sebaiknya pasar rabu dan minggu agar cepat di relokasi di pasar daerah jatibarang supaya sepanjang jalan yang ada di jatibarang bisa tertata rapih dan bersih.

Di tempat lain di kecamatan krangkeng peserta sosialisasi mengaku sangat bersyukur anggota Dewan datang langsung untuk mensosialisasikan raperda dan perda tersebut, kesempatan inipun dimanfaatkan masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Banyak masukan dari masyarakat yang disampaikan saat pertemuan tersebut, antara lain masalah pertanian, dan infrastruktur jalan.

Sosialisasi Perda dan Raperda sangat berdampak positif untuk Anggota DPRD kabupaten indramayu karena selain meningkatkan kinerja Anggota DPRD, sosialisasi Perda juga menjadi tempat silaturahmi antara Anggota DPRD dengan konstituennya.(TIM MP)



Foto Dok. MP

KOMISI IV DPRD INDRAMAYU SHARING PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI DI SURABAYA

JAWA TIMUR MP- Komisi IV Bidang Infrastruktur (Pembangunan) DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Tengah, kunjungan kerja diikuti Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, SP beserta Ketua Komisi IV, M. Alam Sukmajaya, ST.MM, Wakil Ketua Komisi IV, Abdul Rojak dan Sekretaris Komisi IV, Iffan Sudiawan. Turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu. Dalam sambutannya Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu M. Alam Sukmajaya, ST.MM mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangan Komisi IV DPRD Indramayu ke Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dalam rangka berilaturahmi serta mencari informasi dan referensi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

“ Kami ingin sharing mengenai pengelolaan sampah karena kota Surabaya merupakan salah satu contoh kota yang berhasil mengelola sampah. Indikator sukses dalam hal pengelolaan sampah berupa adanya bank sampah serta rumah kompos, sehingga sampah tidak lagi menjadi barang yang tidak berguna”.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya,

Arif Sugiarto menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengelola sampah diantaranya melakukan penyapuan jalan dan pedestrian, pembersihan saluran, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Benowo, pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri dan penegakan peraturan perda. Lebih lanjut Arif Sugiarto mengungkapkan langkah dilakukan dengan membangun bank sampah di sejumlah kelurahan, RT dan RW. Kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk memisahkan sampah anorganik dan organik. Hal ini dilakukan agar beban berkurang ke tempat pembuangan sampah (TPS) 3 R dan tempat pembuangan akhir (TPA) di Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Diperkirakan sampah masuk ke TPA Benowo sekitar 1.100 ton.

Pemkot Surabaya juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi sampah plastik dengan batasi memakai air mineral botol sekali pakai dan sebaiknya menggunakan tempat air minum atau tumbler. “ kami juga memanfaatkan sampah dengan pengolahan sampah organik dengan larva BSF, rumah kompos, PDU/TPS3R, pemanfaatan ban dan sandal bekas, pengolahan sampah pasar dan pemanfaatan sampah botol plastik untuk pelayanan suroboyo bus serta PLTSA mini. Masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya berperan untuk kurangi sampah. Jangan sampai sampah itu jadi beban masyarakat,” ujar dia.

Dilokasi berbeda kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Indramayu disambut Kepala Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo di ruang rapat sidang utama gedung DPRD Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, SP menyampaikan maksud dan tujuan Komisi IV DPRD Indramayu ingin sharing dan mencari referensi mengenai penanganan dampak limbah industri khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Menanggapi hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo, ida menjelaskan mengenai ijin pembuangan air limbah diatur dalam Peraturan Bupati Kab. Sidoarjo Nomor 64 tahun 2011, dalam Perbup tersebut di persyaratan bahwa setiap air limbah yang di buang harus memenuhi baku mutu lingkungan jika tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka rekomendasi teknis ijin pembuangan air limbah tidak bisa diterbitkan. Mengenai Program Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan (SKPL), kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dinilai dari beberapa aspek diantaranya dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). (Tim.MP).

PIMPINAN DPRD INDRAMAYU TEMUI “GERTAC”

Indramayu - Pimpinan DPRD kabupaten Indramayu temui Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Anggaran Covid19 (GERTAC) Indramayu yang terdiri dari gabungan elemen organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa. Senin (15 Juni 2019)

Berempat di ruang rapat pimpinan DPRD kabupaten Indramayu, Rapat dipimpin langsung ketua DPRD kabupaten Indramayu Syaefudin SH didampingi wakil ketua M. Sholihin. S.Sos.I, dan H. Sirojudin SP.

Menyikapi perkembangan wabah covid19 di kabupaten Indramayu dalam Penanganan dampak covid19 yang lamban dan kurang serius serta perencanaan, penetapan dan

pengelolaan anggaran covid19 Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Anggaran Covid19 (GERTAC) Indramayu yang terdiri dari gabungan elemen organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa. Menyatakan sikap :

1. Mendesak pemerintah daerah kabupaten Indramayu dalam hal ini satgas Covid19 untuk menjelaskan secara transparan kepada publik terkait *refocusing* anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid19.
2. Mendesak DPRD kab.Indramayu untuk segera membentuk panitia khusus guna pengawasan anggaran *refocusing* Covid19.
3. Mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini polres dan kejaksaan negeri kab.indramayu untuk melakukan penindakan

Foto Dok. MP



hukum secara tegas jika terjadi penyalahgunaan anggaran *refocusing* Covid19. Ketua pimpinan cabang gerakan pemuda Anzor kab.indramayu Edi Fauzi, S.IP berharap agar DPRD kabupaten Indramayu segera melakukan langkah yang konkrit. tegasnya. Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH sangat mengapresiasi Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Anggaran covid19 (GERTAC) Indramayu.

Kami DPRD menerima aspirasi dari Gertak dan akan ditindak lanjuti sebagai pertimbangan khusus bagi kami ketika nanti rapat kerja. Ungkapnya. Di akhir acara perwakilan Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Anggaran Covid19 (GERTAC) Indramayu memberikan surat pernyataan sikap dengan unsur pimpinan DPRD Indramayu.
Tim MP.



Foto Dok. MP



KOMISI II MENSOSIALISASIKAN RAPERDA DAN PERDA TAHUN 2019 dan 2020

INDRAMAYU MP- Selamatigahariberturut-turut di tiga lokasi, antara lain Kecamatan Patrol, Cantigi dan Lelea.

Komisi II melakukan sosialisasi Perda dan Raperda tahun 2019 dan 2020, sekaligus meminta masukan dan aspirasi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi II Drs. Haryono, MSi, serta seluruh anggota Komisi II Anggi Nofiah, Drs. Eddy Mulyadi, MM, Wardah, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Roni Januri, Dullah, Taryadi dan Ruyanto. Diterima masing-masing Sekretaris di Kecamatan, dikarenakan Camat tengah mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK),

“Dengan melaksanakan sosialisasi yang menyentuh masyarakat langsung ini, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui perda-perda dan raperda-raperda mana yang telah dibuat dan tengah diperjuangkan anggota DPRD beserta Eksekutif dan Kegiatan ini juga dapat menjalin hubungan silaturahmi dengan

masyarakat “ Kata Sekretaris Komisi II Drs. Haryono, MSi dalam sambutannya.

Ada 16 Perda yang sudah di terapkan di tahun 2019 dan ada 11 raperda yang di bahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2020.

Diharapkan dengan di sosialisasikannya Perda serta Raperda ini dapat di terapkan sebaik baiknya sehingga perda yang telah ditetapkan / diundangkan dapat di ketahui keberadaannya oleh masyarakat.

Pada kesempatan sosialisasi tersebut di manfaatkan masyarakat untuk memberikan masukan sehingga anggota DPRD mendapat catatan positif ketika pembahasan raperda. (TIM MP).

KOMISI II DPRD KABUPATEN INDRAMAYU KUNLAP KE SEJUMLAH PUSKESMAS



Foto Dok. MP

INDRAMAYU MP- Komisi II DPRD kabupaten indramayu melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Sukra dan Puskesmas Patrol sebagai fungsi legislatif perihal pengawasan dan melihat secara langsung kesiapan kinerja mitra kerja.

Rombongan komisi II dipimpin Ketua Komisi II Dalam SH.,KN didampingi Haryono, Hj Kursiah,Dullah, Anggi Nofiah, Hj Siti Aminah serta Kepala Dinas Kesehatan.

Menurut Ketua Komisi II DALAM.SH.,KN “ kunjungan lapangan ini kami ingin mengetahui kesiapan puskesmas yang ada di Kabupaten Indramayu dimana Pemerintah pusat berkeinginan agar pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah sebagai BLUD untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola keuangan yang akuntabel salah satunya adalah dengan mendorong Puskesmas dan RSUD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud).

Yg dimaksud dengan (BLUD)”Badan Layanan Umum Daerah” adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja

perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Kunjungan lapangan inipun dimanfaatkan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melihat langsung fasilitas yang ada di Puskesmas serta pelayanan yang diberikan petugas terhadap masyarakat.

Dengan adanya kedatangan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu ke Puskesmas Patrol dan Puskesmas Sukra langsung dimanfaatkan petugas puskesmas dan warga untuk berbincang ,bersalaman dan foto bareng. TIM MP





KOMISI 3 KUNJUNGI PASAR JATIBARANG

INDRAMAYU (MP)- menindak lanjuti rapat kerja dengan Diskopdagin, komisi III DPRD kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan ke pasar daerah Jatibarang. Jumat (10 Januari 2019)

Kunjungan lapangan ini perlu dilakukan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Indramayu, dalam fungsi legislatif perihal penganggaran, pengawasan, terutama terkait kinerja eksekutif dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

Kunjungan lapangan inipun dipimpin langsung ketua komisi III DPRD kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah didampingi anggota Nurhayati, casmuni, Warli,....

Pada kunjungan lapangan tersebut diterima kepala pasar daerah Jatibarang Daswanto langsung Mendampingi komisi III DPRD kabupaten Indramayu melihat langsung situasi dan kondisi yang ada di pasar daerah Jatibarang.

Menurut ketua komisi III DPRD kab Indramayu Ibnu Rismansyah setelah kita tinjau ke lokasi melihat langsung permasalahan yang ada. ternyata Masih banyaknya pembenahan di pasar daerah Jatibarang terkait penataan pedagang, parkir, dan persampahan, masalah sampah masih jadi prioritas, karena dengan pelayanan terbaik masyarakat juga nyaman ketika belanja di pasar. Kami berharap dinas terkait bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada di pasar daerah Jatibarang.

Dalam kunjungan lapangan inipun turut hadir pula ketua ikatan pedagang pasar (IPP) Jatibarang LEO dirinya memaparkan apa saja tugas dan fungsi ikatan pedagang pasar (IPP) dan kami berharap dengan adanya kunjungan lapangan yang dilakukan komisi III DPRD kabupaten Indramayu semoga apa yang di keluhkan oleh pedagang bisa di realisasikan oleh anggota DPRD kabupaten Indramayu. tegasnya (Tim MP)



BAMUS DPRD INDRAMAYU KUNJUNGI DPRD PROVINSI JABAR

INDRAMAYU (MP)-Badan Musyawarah DPRD Kab.Indramayu melakukan kunjungan Konsultasi ke Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung. Kunjungan Konsultasi ini dipimpin ketua dan para Wakil Ketua DPRD serta didampingi oleh anggota Badan Musyawarah DPRD Kab.Indramayu. Adapun tujuan dilaksanakannya kunjungan konsultasi ini diantaranya untuk mengetahui tata cara pelaksanaan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD serta sejauh mana kesiapan anggaran Legislatif jika ada alat kelengkapan dewan atau AKD yang melaksanakan kegiatan yang lokasinya di dalam daerah maupun diluar daerah. Rombongan Badan Musyawarah pun diterima Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Jawa Barat,Arip A.Rifai, beserta jajarannya.



Foto Dok. MP

Menurut Wakil Ketua DPRD Kab.Indramayu, H.Sirojudin SP., Kunjungan Konsultasi Badan Musyawarah ini bisa merupakan penyelarasan program kerja dan kesamaan langkah kegiatan agar tidak berbenturan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Kunjungan Konsultasi inipun sebagai ajang silaturahmi antara Badan Musyawarah DPRD Kab.Indramayu dengan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat beserta jajaran sekretariat dewannya.

"Kunjungan konsultasi ini diperlukan agar Badan Musyawarah DPRD Indramayu dengan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat selalu terjalin komunikasi terkait perencanaan kegiatan dewan dan agar selaras disetiap pelaksanaan musyawarah pimpinan serta anggota DPRD Indramayu". Ujar Sirojudin. Hal senada dikatakan Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin SH. Ia berpendapat kunjungan konsultasi ke Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung ini, termasuk untuk mensinergikan program kerja lembaga Legislatif dengan program kerja Eksekutif. Selain itu dengan dilaksanakannya kunjungan konsultasi tersebut, lanjut Syaefudin, agar Badan Kehormatan DPRD Kab.Indramayu lebih memahami mekanisme penjadwalan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, penjadwalan laporan kegiatan DPRD dan pembukaan masa sidang.

Sementara itu Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Arip A.Rifai, mengatakan, kunjungan konsultasi Badan Musyawarah DPRD Kab.Indramayu ini hendaknya rutin dilaksanakan agar setiap kegiatan pimpinan dan anggota Legislatif tidak lepas dari hasil musyawarah Badan Musyawarah. "Setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD harus berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah". Ujarnya. (TIM MP)



Badan Musyawarah

KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DALAM PENANGANAN MASALAH BURUH MIGRAN

JAWA TENGAH MP - Bertempat di Ruang Rapat Ngasti Widhi Pemerintah Kabupaten Kendal dan Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Kerja (2-3/3/2020), kegiatan tersebut dipandang perlu dilakukan demi memperoleh referensi untuk mengatasi beberapa permasalahan terkait Buruh Migran, Pengadaan e-KTP, Pemilihan Kepala Desa dan Keberadaan Kawasan Industri.

Kunjungan Kerja ke Komisi I ini dipimpin langsung oleh Turah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu yang didampingi oleh Ketua Komisi I Liyana Listia Dewi beserta seluruh Anggota Komisi I DPRD kabupaten Indramayu kegiatan ini diterima oleh Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Pemerintahan dan Politik, Duyanto, S.Pd., M.Si didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dwiyono, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Diyah Noordhanayah dan Staf DPMD Kabupaten Kendal Ami Fathoni .

Sedangkan di Kota Semarang diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Drs. Addi Trihananto beserta Kepala Dinas tenaga Kerja Kota Semarang Dr. Sutrisno, SKM., MPd.yang didampingi beberapa staff.

Dalam sambutannya Wakil Ketua Turah memaparkan maksud dan tujuannya berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, selain untuk bersilaturahmi Komisi I DPRD Indramayu juga ingin menimba ilmu dari Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang yang telah mampu mengatasi kendala dalam hal penanganan masalah buruh migran, pencatatan kependudukan, pemilihan kepala desa dan juga telah adanya sebuah kawasan industri yang mampu menopang perekonomian di Jawa Tengah.

Duyanto, S.Pd., M.Si menyambut baik Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Pemerintahan dan Politik Pemerintah Kabupaten Kendal ini pun mengharapkan dapat pula bertukar pikiran atau sharing pengalaman dari Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu kali ini.

Pemilihan Kabupaten Kendal sebagai tujuan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu ini dapat dikatakan tepat apabila dikaitkan dengan beberapa isu yang akan dibahas, seperti dalam isu penanganan masalah buruh migran, berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pertahun 2018 Kabupaten Kendal memasok sedikitnya 2.400 pekerja pertahun atau rata-rata 200 pekerja perbulan, jumlah ini menjadi jumlah terbesar kedua di Jawa Tengah dan





Foto Dok. MP

KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DALAM PENANGANAN MASALAH BURUH MIGRAN (Hal. Lanjutan...)

urutan ke delapan secara Nasional.

Dengan besarnya jumlah pekerja migran tersebut Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan beberapa inovasi pelayanan, salah satunya dengan diluncurkannya Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-P2TKLN) yang menjadi salah satu program perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan terhadap TKI.

Sedangkan paparan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Drs. Addi Trihananto, diketahui bahwa Kota Semarang mampu mencetak 8.000 keping e-KTP perharinya dengan metode pelayanan dengan pendekatan berbasis masyarakat serta dengan menggalakan gerakan sadar administrasi kependudukan dari tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan yang dilaksanakan sejak tahun 2018.

Berkaitan dengan kelangkaan blangko e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menyasati dengan melakukan koordinasi intensif baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menambah pengadaan blangko e-KTP dengan jaminan bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan dukungan Walikota Semarang mampu menyelenggarakan pelayanan e-KTP sehari jadi dengan estimasi pelayanan dalam durasi menit. TIM MP.



KONSULTASI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) KE DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JAKARTA MP - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri. Sebagai salah satu program kerja dan kegiatan DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu.

Kunjungan Konsultasi dipimpin langsung unsur pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu H. Sirojudin, SH, dan didampingi ketua BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Indramayu Drs. H. Eddy Mulyadi, SE.MM, wakil ketua H. Abdul Rohman, SE.,MM dan anggota Tuti Alawiah, SH, Drs. H. Muhaemin, H. Haryono, Msi, Abdul Rojak, M. Alam Sukma Jaya, ST.,MM, Akhmad Mujani Nur, SH.I, Dalam, SH.KN, Anggi Novia, S.I.Pol, Dullah, H. Nico Antonio, Bhisma Panji Dewantara, S.Si.Apt.

Konsultasi BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Indramayu ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri diterima oleh Bob Sagala selaku bidang yang memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah wilayah Jawa - Bali, bertempat di lantai 3 ruang rapat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri.

Menurut H. Sirojudin, SP dalam sambutannya menuturkan konsultasi ini dilakukan untuk menanyakan terkait pokok-



pokok pikiran DPRD yang akan di tuangkan dalam Raperda tentang tata cara Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Anggota DPRD Kabupaten Indramayu rutin melaksanakan kegiatan Reses setiap 4 bulan sekali untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dan untuk menampung aspirasi masyarakat. Untuk saat ini di Kabupaten Indramayu pokok-pokok pikiran dimasukkan dalam penganggaran belanja langsung, padahal harapannya untuk pokok-pokok pikiran dapat dimasukkan dalam belanja tidak langsung. Selain itu Drs. H. Muhaemin menyampaikan terkait permasalahan yang ada di daerah, misalnya permasalahan jalan provinsi dan pusat yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dan untuk mengatasi hal tersebut harus melalui beberapa tahapan lapor ke provinsi atau pusat terkait dan melalui banyak lintas sektor, agar penyelesaiannya lebih sederhana dan permasalahan cepat teratasi bagaimana langkah yang harus diambil.

Menanggapi hal tersebut Bob sagala, menjelaskan terkait harapan pokok-pokok pikiran yang selama ini dimasukkan dalam penganggaran belanja langsung menjadi penganggaran belanja tidak langsung itu bisa dilaksanakan apabila pokok-pokok pikiran menggunakan e-pokir. Selanjutnya untuk permasalahan yang harus diselesaikan melalui provinsi atau pusat agar tidak melalui banyak lintas sektor, saran dari Bob Sagala hal tersebut bisa di komunikasikan dengan kementrian yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut, bila perlu mengajak pihak Kementrian Dalam Negeri untuk mendampingi menyelesaikan masalah, selain itu kepala daerah juga harus berani berinisiatif untuk membangun koordinasi dan bila perlu dilaksanakan deskripsi.TIM MP.



KOMISI IV KONSULTASI KE BAPENAS TENTANG RKPD

JAKARTA PUSAT(MP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu yang membidangi pembangunan melakukan konsultasi ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Sirojudin, SP didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kab. Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM beserta Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi IV DPRD Kab. Indramayu. Kedatangan rombongan Komisi IV di terima Kepala Sub Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas, Andi Setyo Pambudi diruang rapat kantor Bappenas DKI.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, SP mengungkapkan maksud dan tujuan Komisi IV DPRD Indramayu ingin mencari informasi dan referensi mengenai RKPD Online dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD serta membahas seputar infrastruktur didaerah khususnya wilayah kabupaten indramayu.

Kepala Sub Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas, Andi Setyo Pambudi, menjelaskan mengenai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Demi kelancaran pembuatan dokumen perencanaan perlu disiapkan data pendukung untuk proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dijelaskan bahwa setiap daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah, hal tersebut merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta

mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Selain itu berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah terkait dengan informasi pembangunan daerah paling sedikit memuat diantaranya data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan Profil Pembangunan Daerah serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

“pentingnya RKPD online ini diterapkan di daerah karena dengan RKPD online akan menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Selama ini banyak ditemukan di daerah-daerah ketidak konsistensinya antara perencanaan dan penganggaran, bahwa yang sering menjadi permasalahan di daerah daerah terkait perencanaan adalah perencanaan, program/kegiatan yang diterapkan di daerah masih seringkali 'menomorduakan' prinsip-prinsip keintergrasian antar program/kegiatan antar SKPD serta dengan pelaksanaannya sehingga terjadi inkonsistensi perencanaan” jelasnya

Lebih lanjut Kepala Sub Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV Bappenas, Andi Setyo Pambudi, memamparkan permasalahan lain yang juga masih ditemui di beberapa daerah belum ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu program/kegiatan pada dokumen perencanaan, PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) dengan penetapan alokasi anggaran, program dengan kegiatan KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS dengan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah).

“RKPD online ini untuk menciptakan sinkronisasi antara Renstra (rencana strategis) RKPD, RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), Renja SKPD (satuan kerja pemerintah daerah), RKPD dan PPAS dalam sistem perencanaan daerah” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, M. Alam Sukmajaya, ST.MM mengatakan Komisi IV banyak mendapatkan informasi dan masukan yang bisa di bawa ke indramayu mengenai rencana pembangunan kerja daerah pemerintah kab. Indramayu tahun 2020 , pihaknya kedepan akan membahas lebih lanjut dengan eksekutif di lingkungan kabupaten indramayu. (Tim.MP).

KOMISI II KONSULTASI KE KEMENKES MENGENAI PENGELOLAAN BLUD

JAKARTA-MP. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, dimana Pemerintah Pusat berkeinginan agar Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Sebagai PPK BLUD Untuk Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel salah satunya adalah dengan mendorong PUSKESMAS dan RSUD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut data dari Kementerian Kesehatan saat ini ada 9825 Puskesmas dan sebagian besar belum menjadi BLUD. Permasalahan utamanya terletak pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi II melakukan Konsultasi/Koordinasi ke Kementerian Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta, Konsultasi ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Muhamad Sholihin, S.Sos.i yang didampingi Wakil Ketua Komisi II Anggi Nofiah, Sekretaris Drs. Haryono, MSi, serta anggota Komisi II Drs. Eddy Mulyadi, MM, Wardah, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Roni Januri, Dullah, Taryadi dan Ruyanto.

Diterima di ruang rapat Pelayanan Kesehatan Primer lantai 4 blok C Gedung Adhyatama diterima oleh dr. Sutaryanto dan dr Wing Irawati dari Dir Pelayanan Kesehatan Primer Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang di damping P Yankes sdr Deddy K.

Yang dimaksud dengan ”badan layanan umum daerah” adalah sistem yg diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg mempunyai fleksibilitas dlm pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Setelah menjadi BLUD, apa yang harus di lakukan dan bagaimana pola pengelolaan keuangan BLUD bisa dijalankan dengan baik, seperti yang di terangkan dari Dir Pelayanan Kesehatan Primer dr. Sutaryanto “ dalam hal ini kami dari Kementerian Kesehatan memiliki system dan Software PJJO serta Software PPK-BLUD, dan juga akan melakukan pendampingan dan pencatatan keuangan sebagaimana kebijakan pola pengelolaan keuangan BLUD pasca penerapan dikeluarkan nya Permendagri NO 79 Tahun 2018 “ .

Selain dapat mengelola keuangan secara mandiri blud pun dapat merekrut dan mengelola pegawai sendiri. Tambah dr. Wing Irawati, yang terpenting BLUD mempunyai rencana program pengelolaan (Planning) selama 5 (lima) tahun ke depan. (TIM MP)



KOMISI III DPRD INDRAMAYU KONSULTASI KE DIRJEN PERDAGANGAN



Foto Dok. MP

JAKARTA,MP- Komisi III DPRD kabupaten indramayu Jawa barat melakukan konsultasi dirjen dalam negeri kementerian perdagangan republik indonesia di jakarta. Konsultasi untuk study banding memang perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas dan kinerja komisi III DPRD Kabupaten indramayu terkait pengelolaan pasar daerah.

Konsultasi dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indramayu Serta Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah, Sekretaris H.Ahmad Fathani Dan Anggota H Warli, H Casmuni, Dra. Hj. Nurhayati M.Pdi, Fenty Ruchyanti, Hj Rini Yuliani,Amd, Roikhatul Janah, Kiki Zakiyah, Sp. Menurut Wakil Ketua M Solihin dalam sambutannya di Dirjen Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta. Pasar merupakan salah satu unit usaha milik pemerintah daerah yang tidak sedikit dalam memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Namun kondisi pasar saat ini perlu ada pembenahan dalam peningkatan pendapatan daerah, terutama dalam hal sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik bagi konsumen, serta kami berharap kabupaten indramayu bisa mendapatkan program dari Dirjen Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bisa di kembangkan di daerah khususnya di kabupaten indramayu “. Ungkapnya

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu di terima langsung Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan RI Muhammad Anwar Rahmat . Ditahun 2020 ada beberapa program diantaranya akan ada pelatihan kepala pasar, sekolah pasar dan untuk sekolah pasar sasaran utamanya adalah para pedagang, aktifasi pasar yaitu mengadakan kegiatan di pasar seperti yang di lakukan di mall,dengan disahkannya undang undang no.7 tahun 2014 tentang perdagangan, istilah pasar tradisional berubah penyebutannya menjadi pasar rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, meningkatkan

ekonomi lokal, memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah meningkatkan kesempatan kerja, menyediakan sarana berjualan terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pada saat ini terdapat banyak peraturan yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan pasar, misalnya Perpres no.112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, peraturan menteri perdagangan no. 48 tahun 2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, permen no 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, permen no 20 Thun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar diharapkan dapat menjadikan rujukan agar pasar rakyat menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya indonesia yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifal lokal.





Agenda Konsultasi

KOMISI III DPRD INDRAMAYU KONSULTASI KE DIRJEN PERDAGANGAN (Hal. Lanjutan...)



Foto Dok. MP

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah sangat berterimakasih atas diterimanya di Dirjen Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “ ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kami memiliki 13 pasar tradisional, pendapatan asli daerah selama ini belum terlalu signifikan. kami berharap pasar pasar yang ada di kabupaten indramayu mendapatkan bantuan langsung dari kementerian perdagangan. Dan yang ingin kami sampaikan lagi apakah ada ketentuan untuk ikatan pedagang pasar di setiap pasar rakyat . ungkapny.

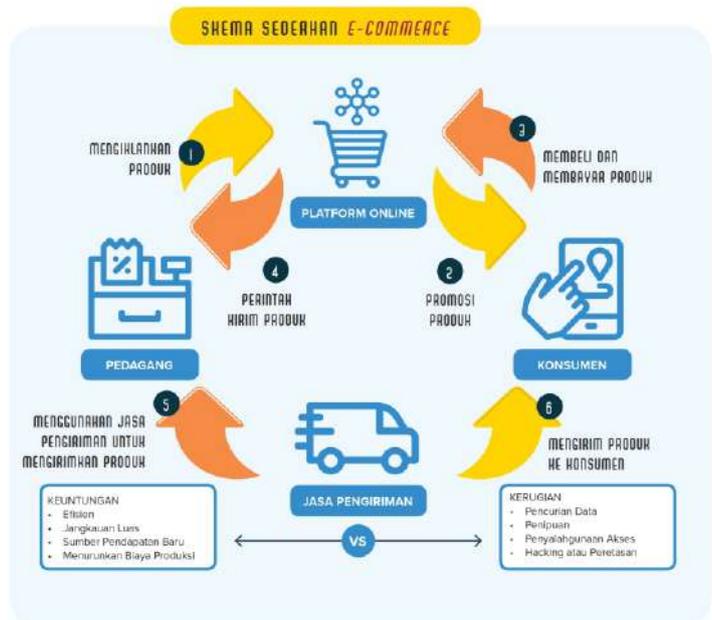
Menanggapi hal tersebut Muhammad Anwar Rahmat mengatakan bahwa ikatan pedagang pasar sebenarnya tidak ada keharusan dibentuk akan tetapi, bila mana pedagang pasar bermusyawarah dan sepakat ingin membentuk ikatan pedagang pasar ya tidak ada masalah yang terpenting bisa memperjuangkan dan mewakili para pedagang. Dan jangan sampai disalahgunakan yang membuat pedagang merasa dirugikan.

Di akhir konsultasi ini DPRD Kabupaten Indramayu mendapatkan buku Standar Nasional dari Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan tanda konsultasi ini sudah selesai. TIM MP



DIKEMDAGRI DINAS USAHA DAN PERALAN DISTRIBUSI (KOT. BIRUS)

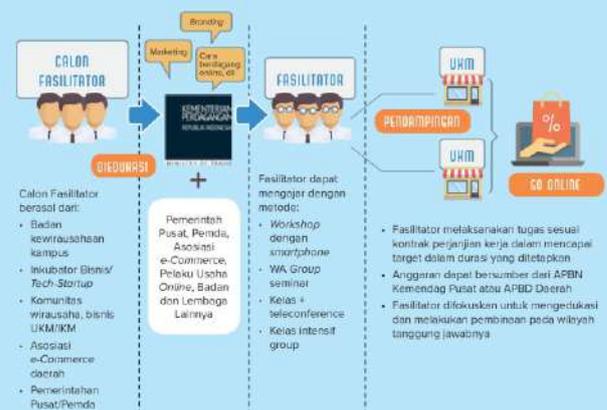
SKEMA SEDERHANA E-COMMERCE



DIKEMDAGRI DINAS USAHA DAN PERALAN DISTRIBUSI (KOT. BIRUS)

PENGEMBANGAN FASILITATOR EDUKASI E-COMMERCE

PENGEMBANGAN FASILITATOR EDUKASI E-COMMERCE



SIAPA ITU FASILITATOR EDUKASI E-COMMERCE?

Fasilitator Edukasi e-Commerce adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami semua aspek e-Commerce dan membantu mereka merencanakan untuk mencapai tujuan menjadi pelaku e-Commerce

SELAMA TAHUN 2017-2018, HEMENDAG TELAH MELATIH 300 TENAGA FASILITATOR EDUKASI E-COMMERCE DI 5 DAERAH (JAWAHTRA, BANDUNG, CIREBON, SOLO, MALANG)

KOMISI II KONSULTASI MENGENAI DANA BOS KE KEMENTERIAN PENDIDIKAN

JAKARTA MP – Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dirjen Dikdasmen dan Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia . Sebagai salah satu program kerja dan kegiatan DPRD Kabupaten Indramayu Masa Persidangan I Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu.

Kunjungan Konsultasi dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH , dan didampingi Wakil Ketua Komisi II Anggi Nofiah, Sekretaris Komisi II Drs. H. Haryono, M.Si serta Anggota Komisi II Drs. H. Eddy Mulyadi, SE.,MM, Wardah, Dullah, Hj. Kursiah, H. Ruyanto, Hj. Siti Aminah. Konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu ke Dirjen Dikdasmen dan Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diterima Kasubag Hukum Dirjen Dikdasmen dan Paud oleh Ani Sayeti, SH. MM, beserta Tim Tekhnis, bertempat di ruang rapat Gedung E lantai 5 Komplek Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menurut Ketua Komisi II Dalam, SH. KN dalam sambutannya mengatakan “ konsultasi ini dilakukan untuk menanyakan terkait pengelolaan dana Bos dari mulai penyaluran sampai dengan pertanggung jawabannya “ .

Menanggapi hal tersebut Ani Sayeti, SH. MM menjelaskan “ bahwa petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun lalu di cabut dan diganti dengan Permendikbud no 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS, sehingga ada penambahan penerima dana BOS yang diberikan secara langsung kesekolah, agar dapat digunakan oleh sekolah sesuai dengan Merdeka Pengelolaan “ . Lebih lanjut diterangkan Tim teknis Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjelaskan, Bahwa pembayaran dari Kas Umum Negara (KUN) kini langsung diberikan ke sekolah masing-masing, yang pembayarannya sesuai dengan tahapan penyaluran Tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 30% dan tahap ke 3 sebesar 40%. Dengan syarat sekolah penerima Bos harus terdaftar dalam Dapodik, memiliki NPSN, bukan satuan pendidikan kerjasama, jumlah siswa rata rata 60 selama 3 tahun berturut turut dan ijin operasional aktif, serta sekolah wajib menyampaikan laporan penggunaan Bos melalui bos.kemendikbud.go.id. TIM MP.



Penggunaan **BOS** di masa kedaruratan **Covid-19** 

Pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah Untuk pembayaran guru honorer yang tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019 (tidak untuk guru honorer baru), belum dapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah. Kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia tetap diberikan.

Alokasi lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah Pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik, maupun pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan.

Persentase penggunaan dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% tidak berlaku.

 Sumber: Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020

 #BelajardariRumah #MerdekaBelajar #BersamaHadapiKorona



Foto Dok. MP

KOMISI III KONSULTASI KE BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI JAWA BARAT

BANDUNG (MP) – Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan salah satu program kerja dan kegiatan DPRD tahun 2020 sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu berupa Konsultasi.

Konsultasi perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja komisi III DPRD Kabupaten Indramayu, sehubungan Sedang Dibahasnya hibah tanah milik aset Pemda indramayu kepada IAIN Syekh Nurjati Cirebon Oleh komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Bersama Tim Asistensi Eksekutif Pemerintah Indramayu Dalam Rangka Mendapatkan Referensi Dan Sharing Pendapat Dan Konsultasi Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.

Konsultasi dipimpin langsung ketua komisi III DPRD kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah didampingi wakil ketua Nico Antonio Sekretaris Ahmad Fathoni dan anggota komisi III DPRD Kab. Indramayu H. Abdul Rohman, SE.,MM, H Casmuni, Hj Rini Yuliani, A.Md, Kiki Zakiyah, SP, Fenti Ruchyanti, Dra. Hj Nurhayati, M.Pdi. Roikhotul Janah, H Warli.

Ibnu Rismansyah dalam sambutannya kami komisi III DPRD Kabupaten Indramayu ingin sharing dan mencari informasi terkait hibah tanah milik aset Pemda Indramayu kepada IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Belum lama ini kami melakukan kunjungan lapangan di lokasi yang akan di hibahkan, dan kami pun ingin mengetahui kajian – kajian yang dilakukan Provinsi, apakah lokasi tersebut sudah layak dijadikan Universitas. Dan kami pun ingin mengetahui dalam peraturan per undang-undangan lembaga apa saja yang layak mendapat hibah” tegasnya.

Dalam Konsultasi tersebut diterima langsung Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Junaedi, SE.Ak Mengatakan "Kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, termasuk diantaranya kegiatan pusat/daerah. Pihak yang dapat menerima hibah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan atau lembaga pendidikan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi. Tekhnis yang berkompeten bahwa lembaga tersebut adalah lembaga yang bersifat non komersial". Pungkasnya.

Ketua komisi III Ibnu Rismansyah adanya keinginan perluasan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon di wilayah Indramayu. Kami berharap supaya masyarakat Indramayu bisa dengan mudah melanjutkan ke perguruan tinggi dan mampu meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Indramayu. Hasil dari konsultasi ini nanti bisa dijadikan bahan referensi kami ketika rapat kerja nanti,” Pungkasnya. (TIM MP)

PSBB KABUPATEN INDRAMAYU

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
di Wilayah Indramayu tanggal 6-19 Mei 2020

Dasar Pelaksanaan PSBB Kab. Indramayu Perbup Kab. Indramayu
Nomor 29 Tahun 2020



APA ITU PSBB?

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus Corona untuk mencegah kemungkinan penyebaran Virus Corona

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum mulai Tgl. 6-19 Mei 2020 atau diperpanjang sesuai kebutuhan

Pendidikan



- ❌ Sekolah/Lembaga Pendidikan diliburkan (Belajar di rumah sistem belajar daring/Jarak Jauh).

Pedagang Makanan, Rumah Makan Restoran dan Café



- ✅ Tidak menyediakan tempat duduk, Pemesanan secara daring (Jarak jauh), dibawa pulang, Physical Distancing, dan Higiene sanitasi pangan.

Keagamaan



- ❌ Tempat Ibadah ditutup untuk umum.
- ✅ warga yang hadir di pemakaman bukan karena Virus Corona Tak lebih dari 20 orang.

Tempat Kerja



- ❌ Kerja kantor diganti kerja di rumah.
- ✅ Kantor Pelayanan Publik, TNI, POLRI, dan Pelayanan Kesehatan, perkonomian, Keuangan, Komunikasi, Industri Ekspor-Impor, Distribusi Logistik.

Tempat/ Fasilitas Umum



- ❌ Fasilitas umum/hiburan ditutup.
- ✅ Pasar Rakyat : 00.00-16.00 WIB
Mini market : 08.00-16.00 WIB
Supermarket : 09.00-18.00 WIB
Apotek/Toko Obat, Toko Peralatan medis, bahan pokok (minyak, gas, energi/listrik) Binatu dan Laundry.

Sosial dan Budaya



- ❌ Kegiatan pertemuan sosial, olahraga, akademik dan budaya.
- ✅ Pernikahan di KUA dan Khitanan (tanpa resepsi) Tak lebih dari 10 orang.

Moda Transportasi



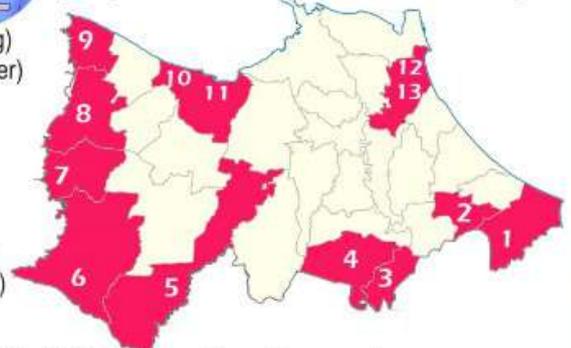
- ✅ Mobil Pribadi : 4 orang (1 di depan, 2 di tengah, 1 di belakang)
Motor : 2 orang alamat KTP harus sama
Angkutan Umum :
Maksimal jumlah penumpang 50%
Jam operasional : 06.00 - 16.00 WIB
- ✅ Mobil Pengangkutan kebutuhan pokok (bahan pangan, energi, logistik, keuangan perbankan) Pertahanan keamanan, Ambulance, operasional medis

13 Pos Check Point



13 Pos Check Point dilakukan untuk memeriksa kesehatan para pendatang yang masuk ke wilayah Kab. Indramayu

1. Desa Singakerta (Krangkeng)
2. Jalur Gopala (Kedokanbunder)
3. Desa Candangpinggan (Sukagumiwang)
4. Desa Gadel (Tukdana)
5. Desa Cikawung (Terisi)
6. Desa Bantarwaru (Terisi)
7. Desa Tumaritis (Haurgeulis)
8. Jalur Salam Dharma (Anjatan)
9. Jembatan Sewo (Sukra)
10. TPI Eretan Kulon
11. TPI Eretan Wetan
12. TPI Karangsong
13. TPI Dadap



Mari Kita Lawan Virus Corona dengan :



diskominfo@2020

INFORMASI NOMOR DARURAT
PENANGANAN VIRUS CORONA (COVID-19)



Hotline Covid Kab. Indramayu
081 113 333 14



BPBD Kab. Indramayu
081 911 019 911



Redaksi



Pembina

Pimpinan DPRD
Kabupaten Indramayu



Penanggungjawab

Iding Syafrudin, SE., M.Si
(Sekretaris DPRD Kab. Indramayu)



Penyusun

Teddy Rakhmat Riyadi, SH
(Kepala Bagian Persidangan & Perundang-undangan)

Torih, SH
(Kepala Sub Bagian Humas & Protokol)



Pelaksana

Tarma, SH
Rita Soegiono



Fotografer & Desain Grafis

Dedi Suwanto, S.Kom
Lucky Gunari Somaatmadja, ST
Prima Novarius, A.md



Alamat redaksi

Jl. Jendral Sudirman No.159 Indramayu 45212
Telp. (0234) 274056, 271278, 271279



Layanan Informasi Publik

www.dprd-indramayukab.go.id
fb : [mediaparlemen](https://www.facebook.com/mediaparlemen)
ig : [dprdindramayu](https://www.instagram.com/dprdindramayu)
sekretariat@dprd-indramayukab.go.id